

LAPORAN PENELITIAN
KINERJA HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN
KOTA DI JAWA BARAT
(studi di Tiga Kabupaten di Jawa Barat)



TIM PENENELITI :

Dr. Agus Rahmat, M.Pd.
(NIDN :0028086703)
Dr. Iriana Bakti, M.Si.
(NIDN :0028106201)

Dibiyai oleh :
Dan DIPA FIKOM UNPAD
Sesuai dengan Surat Keputusan Dekan Fikom Unpad
Tahun 2015

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
AGUSTUS 2015

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN**

Judul Kegiatan : KINERJAHUMAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI DI JAWA BARAT

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 622 / Ilmu Komunikasi

Bidang Penelitian : Kebijakan, Budaya dan Informasi : Peningkatan Kualitas Hidup dan Harmonisasi Sosial

Topik Unggulan : Komunikasi dan Kebijakan Media serta Informasi

Ketua Peneliti

- A. Nama Lengkap : Dr. Agus Rahmat, M.Pd.
- B. NIDN : 0028086703
- C. Jabatan Fungsional : Lektor
- D. Program Studi : Hubungan Masyarakat
- E. Nomor HP : 08122198354
- F. Surel (e-mail) : agusrahmat.fikom@gmail.com

Anggota Peneliti (1)

- A. Nama Lengkap : Dr. Iriana Bakti, M.Si
- B. NIDN : 0028106201
- C. Perguruan Tinggi : Universitas Padjadjaran

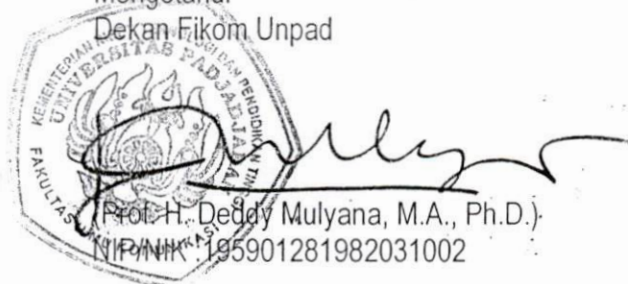
Penelitian Tahun ke : 1 (satu)

Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp. 20.000.000 (dua puluh Juta Rupiah)

Sumber Dana : DIPA Tahun Anggaran 2015


Lokasi Penelitian : Wilayah Propinsi Jawa Barat

Mengetahui
Dekan Fikom Unpad



Prof. H. Deddy Mulyana, M.A., Ph.D.)
NIP/NIK: 195901281982031002

jatinangor, 20 – 8 – 2015
ketua Peneliti



(Dr. Agus Rahmat, Drs. M.Pd)
NIP/NIK: 196708281992031001

ABSTRAK

Saat krisis terjadi, direktur IMF secara tegas mengatakan bahwa "Pemerintah Indonesia butuh Humas, ke dalam untuk menjelaskan apa yang dilakukan oleh pemerintah guna memperoleh dukungan dan ke luar untuk menerangkan apa dan bagaimana yang dilakukan pemerintah agar yang lain percaya". Padahal sudah sejak lama pemerintah di Indonesia termasuk pemerintah daerah memiliki Humas bahkan khusus di lingkungan pemerintah, mereka tergabung dalam wadah Bakohumas. Dua fakta ini mengisyaratkan sekaligus mempertanyakan mengenai kinerja Humas Pemerintah selama ini, dan hasil kajian ini menjelaskan sebagian gambaran dan alasan mengapa kinerja Humas pemerintah di Indonesia tidak memuaskan para pimpinan pemerintahan khususnya di daerah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat taufik dan hidayah Nya, laporan penelitian dengan judul Kinerja Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Daerah Kabupaten dn Kota di Jawa Barat berhasil diselesaikan.

Peneliti menyadari kegiatan penelitian inipun tidak akan terlaksana tanpa dukungan dan bantuan serta kerja sama berbagai pihak. Oleh karena itu, tim pelaksana peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu selesainya penelitian ini.

Semoga semua kebaikan dalam upaya mendukung penyelesaian penelitian ini mendapat imbalan dari Allah SWT. Amin

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

BAB IV METODE PENELITIAN

BAB V HASIL YANG DICAPAI

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

Perubahan paradigma manajemen pemerintahan sejak era otonomi daerah telah membawa konsekuensi pada perubahan orientasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Beberapa orientasi yang dapat dicermati adalah: orientasi yang berasal dari layanan publik ke arah orientasi market; orientasi sentralistik ke desentralistik ; orientasi media pelayanan ke tujuan pelayanan.

Seiring dengan dinamika masyarakat yang semakin cepat dan juga euporia demokrasi semenjak jaman reformasi yang berlanjut sampai saat ini, kondisi ini telah menimbulkan berbagai masalah sosial dan perubahan ketata negaraan yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia dengan segenap unsurnya termasuk pemerintahan di daerah. Salah satu pemerintah daerah yang mengalami kondisi ini adalah Jawa Barat.

Bagi pemerintah di daerah, tentunya penting untuk mengantisipasi berbagai perubahan yang muncul seperti tuntutan publik internal dan publik eksternal yang semakin tinggi. Euporia kehidupan pers, jaminan atas kebebasan masyarakat untuk memperoleh informasi publik atas jalannya pemerintah dan pemerintahan, sampai ke tindakan anarkis masyarakat.

Semua itu memerlukan pendekatan-pendekatan yang berbeda dengan jaman dulu, jaman yang mengandalkan "power" menjadi pendekatan yang lebih menekankan pada "*personal aproach dan relationship*", dan salah satu institusi yang memiliki fungsi erat dengan ini adalah Hubungan Masyarakat (*Public Relations (PR)*).

Persoalan yang muncul adalah, perubahan-perubahan ini seringkali tidak diimbangi dengan peningkatan kemampuan aparat pemerintah guna mengimbangi